

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Sebagian besar negara di dunia menghadapi sejumlah tantangan mendasar dalam masalah makroekonomi. Permasalahan tersebut mencakup ketidakstabilan kegiatan ekonomi, neraca perdagangan, inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan pengangguran. Di antara permasalahan tersebut, pengangguran dipandang sebagai isu makroekonomi utama yang mempengaruhi standar hidup dan stabilitas sosial. Menurut Mankiw (2022) tidak memiliki pekerjaan dapat mengurangi kualitas kehidupan dan menyebabkan beban psikologis. Selain itu, pengangguran tidak hanya mempengaruhi individu secara langsung, sekaligus berperan sebagai indikator yang menggambarkan kondisi ekonomi suatu negara.

Sejalan dengan itu, tingginya tingkat pengangguran mampu menjadi indikasi bahwa perekonomian suatu negara sedang mengalami masalah struktural, seperti kurangnya lapangan kerja atau penerapan kebijakan yang kurang mampu mendorong perbaikan kondisi ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran meliputi pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Ketiga faktor ini memiliki peran signifikan dalam menentukan seberapa besar peluang kerja tersedia bagi penduduk suatu negara (Baihawafi & Sebayang, 2023).

Pertumbuhan ekonomi dipandang sebagai faktor penting dalam menjelaskan perubahan pada tingkat pengangguran. Pada saat perekonomian berkembang dengan pesat, seringkali ini menjadi pendorong utama dalam menciptakan lapangan kerja. Contohnya negara maju seperti Amerika Serikat dan Jerman membuktikan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi yang stabil mampu menurunkan angka pengangguran. Di Amerika Serikat, kebijakan fiskal dan moneter diterapkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pasca krisis 2008 berhasil menurunkan angka pengangguran secara berkelanjutan (Bernanke, 2015). Sementara itu, Jerman berhasil mempertahankan stabilitas ekonomi dan menciptakan peluang kerja baru melalui reformasi pasar tenaga kerja yang

fleksibel, seperti program *Hartz*, serta strategi yang berorientasi pada daya saing global dan ekspor (Dustmann *et al.*, 2014).

Sementara itu, perekonomian India maupun Brazil yang tergolong dalam negara berkembang menghadapi tantangan berbeda. Meskipun kedua negara tersebut mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi, tetapi masih menghadapi tingkat pengangguran yang cukup besar. Misalnya, di India meskipun ekonomi tumbuh pesat, lapangan kerja tidak meningkat secara proporsional, sehingga pengangguran tetap menjadi masalah serius (Ghose & Kumar, 2021). Sementara itu, di Brazil, ketimpangan distribusi pendapatan dan kurangnya reformasi struktural telah menghambat penciptaan lapangan kerja yang memadai, meskipun perekonomian mengalami pertumbuhan (Gori & Menezes, 2014).

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak senantiasa berbanding lurus pada berkurangnya tingkat pengangguran. Fenomena serupa juga terlihat di Indonesia. Pada periode 2005, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5.60 persen, sementara itu tingkat pengangguran justru mengalami peningkatan hingga mencapai 11.24 persen (BPS, 2024). Kondisi ini mengindikasikan terjadinya *jobless growth*, yang ditunjukkan oleh lemahnya penciptaan lapangan kerja meskipun perekonomian mengalami pertumbuhan. Fakta tersebut mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi saat ini masih belum bersifat inklusivitas dan belum bisa menjawab permasalahan ketenagakerjaan secara menyeluruh.

Tidak hanya pertumbuhan ekonomi, kebijakan upah minimum berperan penting dalam kondisi ketenagakerjaan. Kebijakan upah minimum bertujuan untuk menjaga kondisi ekonomi pekerja serta meningkatkan kemampuan konsumsi masyarakat. Namun, dalam praktiknya, dampak upah minimum terhadap pengangguran tidak senantiasa menunjukkan pola satu arah. Pada periode tertentu, peningkatan upah minimum di Indonesia tidak diikuti oleh penurunan tingkat pengangguran, bahkan cenderung beriringan dengan meningkatnya pengangguran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan upah minimum berpotensi menimbulkan tekanan biaya bagi dunia usaha, khususnya di daerah yang struktur

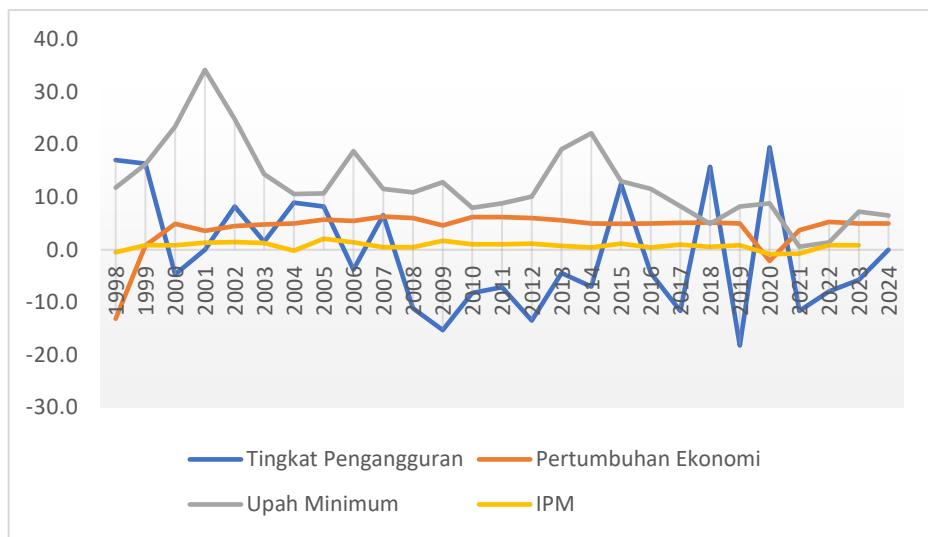
perekonomiannya didominasi sektor padat karya serta memiliki kinerja tenaga kerja yang belum optimal.

Di sisi lain, tingginya kualitas sumber daya manusia sebagaimana terlihat pada kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diharapkan mampu memperkuat daya saing tenaga kerja serta menurunkan tingkat pengangguran. IPM Indonesia terus mengalami peningkatan, menandakan adanya perkembangan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat, tetapi peningkatan IPM tersebut belum sepenuhnya diiringi oleh berkurangnya tingkat pengangguran. Bahkan, pengangguran di Indonesia cenderung didominasi oleh kelompok tenaga kerja berpendidikan menengah dan tinggi. Kondisi ini mengindikasikan terjadinya *mismatch* antara kompetensi yang dimiliki angkatan kerja dan tuntutan pasar kerja, sehingga peningkatan kualitas sumber daya manusia belum tentu secara langsung menjamin terserapnya tenaga kerja,

Krisis finansial Asia tahun 1997-1998 menjadi titik balik bagi perekonomian Indonesia. Krisis tersebut menyebabkan nilai tukar rupiah mengalami depresiasi tajam, pertumbuhan ekonomi terkontraksi hingga -13.1% pada tahun 1998, inflasi melonjak tinggi, dan angka pengangguran meningkat pesat (World Bank, 1998). Selain berdampak pada sektor keuangan, krisis tersebut juga menimbulkan guncangan sosial dan politik yang berujung pada lahirnya era reformasi. Menurut Tambunan (2010) krisis ini membuka kesadaran akan perlunya perubahan mendasar dalam kebijakan ekonomi Indonesia agar lebih terbuka, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

Sebagai respon terhadap krisis, pemerintah Indonesia pada era pasca reformasi mulai melakukan berbagai kebijakan ekonomi untuk menstabilkan perekonomian dan mengurangi pengangguran. Kebijakan tersebut meliputi deregulasi ekonomi, restrukturisasi sektor keuangan, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi dan pasar tenaga kerja (Tambunan, 2010). Selain itu, pemerintah juga menetapkan kebijakan upah minimum sebagai instrumen perlindungan tenaga kerja dalam rangka menjaga kesejahteraan pekerja dan stabilitas pasar tenaga kerja. Pemerintah juga menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia melalui investasi di bidang

pendidikan, kesehatan, serta pengurangan kemiskinan, sebagaimana terlihat pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (UNDP, 2020).



Gambar 1. 1 Dinamika Pertumbuhan Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan IPM Tahun 1998-2024 (persen)

*Sumber: Data Diolah dari World Bank, 2025*

Gambar 1.1 menunjukkan perkembangan pertumbuhan tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia selama periode 1998-2024. Secara umum, kondisi pengangguran di Indonesia mengalami fluktuasi sepanjang rentang waktu tersebut. Krisis ekonomi Asia dan krisis global 2008 serta pandemi COVID-19 yang terjadi pada 2020 terbukti menimbulkan dampak pada pasar tenaga kerja. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan pola pemulihan yang relatif stabil dengan kisaran pertumbuhan tahunan sekitar 4-6 persen. Kebijakan kenaikan upah minimum dilakukan secara bertahap sebagai upaya menjaga kesejahteraan pekerja, sedangkan IPM menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang periode pengamatan.

Meskipun pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia menunjukkan tren yang cenderung meningkat, dinamika tingkat pengangguran di Indonesia masih mengalami fluktuasi. Berbagai fenomena

empiris mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang meningkat tidak sepenuhnya diiringi oleh penurunan pengangguran, kenaikan upah minimum tidak selalu sejalan dengan meningkatnya daya serap tenaga kerja, serta perbaikan kualitas sumber daya manusia belum sepenuhnya mampu mengatasi pengangguran, terutama pada tenaga kerja terdidik. Selain itu, perbedaan karakteristik ekonomi, sistem pasar tenaga kerja, serta tingkat pembangunan antar daerah di Indonesia sangat beragam. Perbedaan tersebut menyebabkan dampak ketiga variabel tersebut terhadap tingkat pengangguran berbeda antar provinsi. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pertumbuhan ekonomi mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan upah minimum mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia?
3. Bagaimana Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mempengaruhi tingkat pengangguran di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.
2. Untuk menganalisis pengaruh kebijakan upah minimum pada tingkat pengangguran di Indonesia.
3. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan berkontribusi memperluas wawasan mengenai pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia.

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi pemikiran sekaligus menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam penyusunan kebijakan bertujuan mengurangi pengangguran.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai sumber referensi bermanfaat, meningkatkan pemahaman secara lebih mendalam, serta sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya yang mempunyai relevansi dengan topik sama.